

**PERAN BHABINKAMTIBMAS
DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**

**ROLE OF BHABINKAMTIBMAS
IN MAINTAINING NATION AND UNITY**

Ivone Kartika
Program Studi D-3 Kepolisian
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan beradab. Pemeliharaan keamanan dalam negeri tersebut dapat dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian Negara yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar (Mabes) Polri yang dipimpin oleh seorang Kapolri kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh seorang Kapolda, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor yang dipimpin oleh seorang Kapolres, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor dengan pimpinan seorang Kapolsek, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada seorang Brigadir Polisi atau sering disebut Bhabinkamtibmas

Kata kunci: *Bhabinkamtibmas, Persatuan dan Kesatuan*

ABSTRACT

Domestic security is the main requirement in supporting the realization of a prosperous and civilized just society. The maintenance of domestic security can be carried out through efforts to carry out the functions of the National Police which include security and public order, law enforcement, protection, protection and service to the community.

As stipulated in the Government Regulation the police area is divided in stages starting from the central level, commonly referred to as the National Police Headquarters which is led by a National Police Chief then the area at the Provincial level is called the Regional Police led by a Regional Police Chief, at the District level Resort led by a police chief, and at the subdistrict level there is a Sector Police with the head of a police chief, and at the Village or Village level there is a Police Brigadier or often called the Bhabinkamtibmas.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Unity and Unity*

1. PENDAHULUAN

Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian

mengingat Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat. Dalam komunitasnya.

Bhabinkamtibmas selaku petugas (*officer*) terdepan Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi.⁸ Persoalan gangguan keamanan dan ketertiban termasuk konflik (Nitibaskara, 2002) tidak muncul dengan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan yakni tahap pendahuluan, tahap titik didih, tahap konflik kekerasan, dan tahap peredaan konflik, seorang Bhabinkamtibmas harus mampu dan berkompeten dalam mengeliminir potensi-potensi gangguan tersebut. Sehingga melalui Bhabinkamtibmaslah dapat dilihat titik awal seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, persatuan merupakan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Nilai ini mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atau batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya, dengan bersumber pada nilai dasar ketiga dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia⁹.

2. PERMASALAHAN

Mengacu kepada latar belakang tersebut di atas, penulisan ini mengangkat permasalahan bahwa belum optimalnya Peran Bhabinkamtibmas di Polres dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa guna membangun kepercayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif.

3. TINJAUAN PUSTAKA

a. *Optimalisasi*, Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995:628) berasal dari kata Optimal yang berarti terbaik, sedangkan Optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Dalam konteks penulisan ini adalah pelaksanaan Sila persatuan melalui kinerja Bhabinkamtibmas belum mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

a. *Peran Bhabinkamtibmas*, Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran¹⁰. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan **Bhabinkamtibmas** adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

⁸ Admin, peran Bhabinkamtibmas <http://bhabinkamtibmas.com/bhabinkamtibmas-itu-apa-sih>.

⁹ Admin, *Pancasila sebagai Sumber Nilai*, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CzyxvaucmnAJ:herwanparwiyanto>.

<http://www.artikelsiana.com/2013/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html> diunduh tanggal 27 April 2013

- b. **Menjaga**, adalah merawat atau memelihara secara baik dan menjaga agar aman dan tertib.
- c. **Persatuan Kesatuan**. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan Kesatuan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan.¹¹
- d. **Membangun** adalah perubahan dan transformasi sikap dan pola pikir yang diharapkan antara lain : perubahan dari kebiasaan berpikir negatif menjadi positif , kebiasaan berpikir jangka pendek ke berpikir jangka panjang, bekerja sendiri menjadi bekerja team, mencari cari masalah menjadi menemukan solusi, bergantung menjadi mandiri, sentralitis menjadi otonom, elitis menjadi egaliter, prestise menjadi prestasi, asal asalan menjadi yang terbaik, tiba masa tiba akal menjadi terencana, nepotisme ke meritokrasi, hierarkis ke hiterarkis, sloganistis protokoler menjadi pengamalan substansial¹².
- e. **Kepercayaan**, adalah kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai (Moorman, 1993).
- f. **Masyarakat**, adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk kehidupan berbudaya yang mempunyai aturan atau budaya.
- g. **Mitra**, adalah partner atau rekan yang membantu, dalam hubungan pekerjaan.
- h. **Keamanan negara**, Keamanan negara adalah terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa Indonesia.

2.1 Teori Manajemen Strategik

Manajemen Strategik adalah suatu seni dan ilmu dan pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusankeputusan strategis antar fungsifungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuantujuan masa datang¹³.

Dari definisi di atas, terdapat dua hal penting yang dapat disimpulkan, yaitu bahwa:

- a. Manajemen strategik terdiri atas tiga proses:
 - 1) Pembuatan Strategi.
 - 2) Penerapan Strategi.
 - 3) Evaluasi/ kontrol Strategi.
- b. Manajemen strategik menurut Pearce dan Robinson¹⁴:
 - 1) Merumuskan misi organisasi.
 - 2) Mengembangkan profil organisasipada kondisi intern dan kapabilitasnya.
 - 3) Menilai lingkungan ekstern organisasi (peluang dan kendala).
 - 4)Menganalisis opsi organisasidisesuaikan dengan sumber dayanya.
 - 5) Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki.
 - 6) Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum.
 - 1). Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek.
 - 2). Mengimplementasikan pilihan strategik melalui alokasi sumberdaya yang ada.

¹¹ Admin, persatuan dan Kesatuan http://obrolanpolitik.blogspot.co.id/2013/03/memahami-makna-persatuan-dan-kesatuan_14.html

¹² <http://2frameit.blogspot.co.id/2011/07/landasan-teori-konsep-membangun.html>Marwah Daud Ibrahim (2003 : 24-26)

¹³ Agustinus Sri Wahyudi. 1996. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara

¹⁴ Pierce, John A dan Richard B Robinson. *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jilid 1. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

- 3). Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang.

Teori ini difungsikan sebagai pisau analisis guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perwujudan Sila Persatuan Bangsa melalui kinerja Bhabinkamtibmas Polri dalam rangka Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Disamping itu, manajemen strategik ini digunakan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah serta menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai (*goal*).

2.2 Teori Kompetensi

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Menurut Trotter dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompoten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksikan pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Menurut Boulter *et.al* (1996) level kompetensi adalah sebagai berikut: *Skill, Knowledge, Self-Concept, Self Image, Trait* dan *Motive*.

Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi (MSDM-BK) disusun dengan pendekatan pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) disingkat KSA. Dasar penggunaan pendekatan ini dengan pertimbangan bahwa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap merupakan elemen untuk menghasilkan kinerja (*performance*) yang baik¹⁵.

¹⁵ Admin, *Kompetensi*, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/2>

2.3 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam kaitannya dengan penyerahan kewenangan sumber daya manusia, aspek pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam upaya mengelola sumber daya manusia secara keseluruhan. Pada hakekatnya pengembangan sumber daya manusia mempunyai dimensi luas yang bertujuan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dalam organisasi (Wayne dan Awad, 1981:29). Pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak bagi suatu organisasi dalam menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun dan terutama untuk menjawab tantangan masa depan (Siagian, 1996:182).

3.1 METODE

Dalam hal ini Bhabinkamtibmas Polres Bandung menggunakan 4 metode dalam bentuk kegiatan Binmas diantaranya :

- a. Tatap muka. Metode tatap muka dalam lingkup pembinaan masyarakat
- b. Kunjungan/sambang
Kegiatan kunjungan atau sambang oleh Bhabinkamtibmas di desa berkaitan dengan masalah yang terjadi di masyarakat dalam situasi nyata di desa tersebut.
- c. Ceramah
Metode ceramah adalah suatu cara pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat melalui penerapan lisan oleh Bhabinkamtibmas kepada masyarakat desa yang dibina.
- d. Karya bakti /bantuan masyarakat (banmas). Memberikan bantuan kepada masyarakat dengan menghadiri setiap kegiatan masyarakat.

8054/3/Chapter%20II.pdf diunduh tanggal 27 April 2013

3.6 Implikasi

Implikasi adalah efek yang dirasakan akibat dari permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam bentuk persoalan. Persoalan yang didapat dari kondisi faktual tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dapat dilihat dari indikator kemampuan SDO dan SDM yang dimiliki Satbinmas Polres Bandung dan jajaran Bhabinkamtibmas baik dari kuantitas maupun kualitas.
- b. Sistem dan Metode yang belum mampu dilakukan secara optimal, mengingat perkembangan dunia global dan kemajuan teknologi menuntut adanya suatu progres yang harus diimbangi dengan kreativitas dan dukungan dari semua pihak.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

4.1 Internal

- a. Kekuatan
 - 1) Kebijakan pimpinan Polri tentang penguatan program Harkamtibmas dengan memberdayakan Polsek dan Bhabinkamtibmas sebagai barisan terdepan dalam pelaksanaan tugas Polri.
 - 2) Adanya Grand Strategi Polri tahap II yaitu Partnership Building dan networking building yang mensyaratkan perlunya kerja sama yang dilakukan Polri secara intensif didalam mewujudkan keberhasilan strategi tersebut.
 - 3) Adanya struktur jabatan Bhabinkamtibmas dalam setiap Polsek jajaran di Polres Bandung.
Dalam pelaksanaan tugasnya seorang Bhabinkamtibmas telah diberikan dukungan anggaran dan sarana prasarana antara lain sebesar @ Rp. 1.100.000 dengan rincian uang saku Rp. 22.000,00 x 22 hari, uang makan Rp.23.000,00 x 22 Hari dan sisanya Rp. 110.000,00 digunakan

untuk sarana kontak kepada warga masyarakat di wilayahnya. Dalam mendukung mobilitas Bhabinkamtibmas menuju masing masing lokasi di tiap desa atau kelurahannya telah di berikan dukungan sepeda motor dari dinas, beserta dukungan BBM sebesar 1,5 liter/hari.

b. Kelemahan

- 1) Sistem Rekrutmen tanpa berdasarkan kompetensi (*Competency Base*) serta tidak didukung oleh input pendidikan kejuruan dan pengembangan fungsi Binmas, sehingga menghasilkan SDM yang tidak kompeten.
- 2) Belum terpenuhinya secara kuantitas Bhabinkamtibmas dengan rasio jumlah 1 desa 1 Bhabinkamtibmas.
- 3) Masih rendahnya motivasi anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan kepada masyarakat terutama dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat.
- 4) Terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana serta petugas operasional kepolisian, sehingga tidak optimalnya Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas kegiatan sehari hari.

4.2 Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya dukungan dari tokoh masyarakat, stakeholders, dan instansi terkait untuk menciptakan dan memelihara situasi kamtibmas yang kondusif di daerah hukum Polres Bandung dan jajaran dalam penguatan *policing* proaktif.
- 2) Adanya kearifan lokal yang bisa membantu pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada di desa.
- 3) Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dibidang ilmu manajemen yang diantaranya adalah

manajemen konflik, sehingga memberikan peluang dalam pengelolaan maupun penanganan konflik vertical dan horizontal secara tepat yang terjadi ditengah-tengah masyarakat guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka terwujudnya kamdagri.

- 4) Hubungan yang baik dengan media massa.
 - b. Ancaman (*Threats*)
 - 1) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah.
 - 2) Peran media masa dan media elektronik tidak berimbang dalam membentuk opini dimasyarakat.
 - 3) Paradigma Polri yang masih mengedepankan penegakan hukum.
 - 4) Masyarakat masih beranggapan bahwa faktor keamanan merupakan tugas dan tanggung jawab Polri.

Pembahasan

Guna Harkamtibmas dalam hal tindakan pre-emptif, preventif dan dan tindakan selanjutnya yang bersifat penegakan hukum dalam rangka menjaga persatuan kesatuan bangsa di daerah hukum Polres Bandung maka peran optimal Bhabinkamtibmas di Polsek polsek jajaran harus dapat memberikan kontribusi yang besar untuk dapat memberikan harapan yang besar, untuk dapat mewujudkan harapan harapan dengan mengintensifkan giat Bhabinkamtibmas ditingkat kelurahan dan desa dimana sangat membutuhkan kondisi ideal yang berkaitan dengan kinerja Bhabinkamtibmas yang hanya dapat terwujud dengan didukung oleh aspek aspek sebagai berikut :

5.1 Sumber Daya Daya Manusia

1. Kuantitas

Pada aspek kuantitas perlunya penambahan personil sehingga dapat terpenuhinya 1 desa 1 Bhabinkamtibmas,

sesuai dengan DSP yang tertuang dalam Lampiran A4 Perkap No. 23 tahun 2010 tentang OTK Polres dan Polsek. Kekurangan sebanyak 40 personil Polri (32 personil Bhabinkamtibmas) pada Tabel 1 diutamakan untuk dipenuhi dengan personil yang memiliki sikap sebagai polisi sipil serta memiliki integritas.

2. Kualitas

Pada aspek kualitas diperlukan peningkatan kemampuan tentang Binmas khususnya dalam aplikasi Polmas secara menyeluruh dan penguasaan materi yang berkaitan dengan Harkamtibmas. Mengirim anggota SatBinmas termasuk Bhabinkamtibmas pada Polsek jajaran untuk mengikuti Dikjur Binmas dan Polmas bagi yang belum pernah mengikuti.

Menurut data pada Tabel 2, personil yang telah mengikuti dikjur adalah hanya 72 personil dan masih ada anggota yang belum mengikuti dikjur sebanyak 38 personil. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan personil Polri khususnya pengemban fungsi Bhabinkamtibmas yang meliputi :

1) *Knowledge* (Pengetahuan)

a. Memahami Pancasila dan UUD 1945, Tribrata dan Catur Prasetya, penguasaan Perundang undangan terkait, tanpa pengabaian Kode Etik Profesi Polri. Hal ini dimaksudkan untuk landasan dalam kinerja Polri pada aspek pelayanan masyarakat di bidang penegakan hukum.

b) Meningkatnya kemampuan petugas Bhabinkamtibmas dalam hal pengetahuan, pemahaman dan pola pikir dengan sehingga dapat melakukan kegiatan kemitraan atau partnership sehingga menimbulkan kerjasama sinergis dan harmonis antara Polri, TNI dalam hal ini Babinsa, aparat desa, tokoh, dan masyarakat.

2) *Skill* (keterampilan)

- a) Mampu menampilkan gaya kerja yang responsif atau ketangapsegeraan dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan membangun kemitraan terkait dengan gangguan kamtibmas.
 - b) Kemampuan Bhabinkamtibmas yang meliputi communication skill, problem solving skill, leadership skill secara signifikan dapat meningkat sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk ikut mendukung keberhasilan pemolisian masyarakat terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
3. *Attitude* (sikap)
- a) Masyarakat berangsur angsur percaya (*trust*) dengan pelayanan yang diberikan oleh Polri khususnya lini terdepan sebagai pelayan masyarakat, tidak memiliki mental dilayani oleh masyarakat.
 - b) Meningkatnya motivasi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan program program Polri sebagaimana tertuang pada Tahapan Grand Strategi Polri terutama terkait dengan program program percepatan unggulan dalam pelaksanaan tugas.

5.2 Anggaran

Dalam pelaksanaan tugasnya Bhabinkamtibmas diberikan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.100.000,00 dimana dalam pelaksanaannya tidak semua Bhabinkamtibmas dapat terpenuhi dukungan operasionalnya dalam anggaran tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kondisi geografi dan ekonomi dari masing masing desa atau kelurahan tempat Bhabinkamtibmas bertugas. Selain itu dukungan anggaran yang diberikan tersebut hanya mencukupi pelaksanaan hari kerja selama 22 hari,

padahal dalam kenyataannya Bhabinkamtibmas hampir selalu melekat dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat yang ada di wilayahnya. Dan hal tersebut juga terkadang hampir berlangsung selama satu bulan penuh atau rata rata 30 hari. Maka yang di harapkan pemenuhan anggaran dari Bhabinkamtibmas dapat di susun maupun dipenuhi dengan berbasis pada kegiatan masyarakat.

5.3 Sarana dan Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas petugas Bhabinkamtibmas sesuai dengan yang diharapkan perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kewilayahan. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan yang diharapkan yaitu :

1. Adanya penambahan jumlah BBM dari 1,5 liter/hari menjadi 5 liter/hari guna mendukung mobilisasi pergerakan Bhabinkamtibmas ke seluruh daerah desa binaanya .
2. Adanya penambahan jumlah kendaraan sepeda motor sebanyak 34 unit dari jumlah yang ada sebanyak 60 unit.
3. Adanya penambahan alat komunikasi untuk petugas Bhabinkamtibmas, dalam hal ini alat komunikasi berupa HT sebanyak 44 unit dari jumlah yang ada sebanyak 50 unit sebagai sarana mempercepat pelaporan petugas Bhabinkamtibmas dan Kaporlap perorangan.
4. Adanya biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan sepeda motor para Bhabinkamtibmas apabila terjadi kerusakan.

5.4 Sistem dan Metode

Bhabinkamtibmas membutuhkan suatu creative breakthrough atau terobosan kreatif diluar metode yang sudah berjalan. Adapun Jalur pembinaan dengan 3 (tiga) komponen ini dapat dilakukan oleh pelaksana fungsi pembinaan masyarakat, antara lain melalui :

1. Jalur polri, Melalui pengembangan fungsi polri lainnya, tugas pembinaan masyarakat dapat dilaksanakan sebagai bagian integral dari tugas pokoknya.
2. Jalur instansi, Melalui koordinasi dan kegiatan lintas sektoral fungsi pembinaan masyarakat dapat dikaitkan dengan fungsi Binmas pada instansi lain sehingga di capai keterpaduan menangani masalah masalah tertentu untuk mencegah atau menghilangkan potensi gangguan kamtibmas dan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan kamtibmas.
3. Jalur masyarakat, Melalui sistem komunikasi sosial yang efektif dan sistem pembinaan yang tepat memungkinkan diperolehnya simpati, kerjasama dan kesediaan masyarakat untuk membantu polri membimbing sesama warga masyarakat untuk menjuhkan diri dari kejahatan atau gangguan kamtibmas dalam hubungan ini peranan tokoh tokoh masyarakat dan orang orang berpengaruh lainnya sebagai pembina sangat menentukan.

5.5 Kontribusi

Kondisi ideal tersebut akan mempunyai kontribusi terhadap pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang pada akhirnya mampu mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif. Kondisi

ini dapat dilihat dari indikator indikator berikut:

- a. Kemampuan SDM SatBinmas Polres Bandung baik dari kuantitas maupun kualitas mampu dimaksimalkan.
- b. Meningkatnya kompetensi SDM SatBinmas Polres Bandung sesuai peran dan fungsinya.
- c. Meningkatnya kinerja dan Peranan Petugas Polmas dalam hal ini Bhabinkamtibmas untuk melakukan tugasnya dengan baik dan maksimal.

Guna mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif dengan mengimplementasikan sila persatuan Indonesia, maka upaya yang dilakukan Kapolres Bandung dan jajarannya adalah sebagai berikut:

6.1 Visi dan Misi

a. Visi

Terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa melalui peran Bhabinkamtibmas Polres Bandung yang profesional, bermoral dan modern dengan cara meningkatkan kinerja yang berlandaskan nilai-nilai pancasila dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa guna membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam rangka terwujudnya keamanan dalam negeri yang kondusif.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya organisasi dalam mendukung peran Bhabinkamtibmas Polres Bandung dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjadikan masyarakat di daerah hukum Polres Bandung sebagai mitra Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam

- negeri yang kondusif.
- 2) Memantapkan system dan metode, guna memanfaatkan dan mengoptimalkan kearifan lokal yang ada di daerah hukum Polres Bandung.

6.2 Tujuan

- a. Terpenuhiya serta terdukunganya sumber daya organisasi, anggaran dan sarana prasarana guna menunjang kegiatan operasional dan optimalisasi peran Bhabinkamtibmas di Polres Bandung.
- b. Terbentuknya system dan metode tepat guna dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan kearifan lokal yang ada di daerah hukum Polres Bandung.

6.3 Sasaran

6.4

- a. Peningkatan sumber daya organisasi, anggaran dan sarana prasarana guna menunjang kegiatan operasional dan optimalisasi peran Bhabinkamtibmas di Polres Bandung.
- b. Sistem dan metode dapat optimal melalui evaluasi sistem yang telah berjalan serta menyusun sistem baru yang kompatibel dalam menyelesaikan permasalahan dimasyarakat.

6.5 Kebijakan

Dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka arah kebijakan Kapolres Bandung untuk mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam rangka mewujudkan kamdagri adalah :

- a. Menunjuk dan menempatkan personil Bhabinkamtibmas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi.
- b. Menyusun dukungan anggaran yang tepat sehingga mampu memotivasi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai garda terdepan Kepolisian dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menyusun dukungan akan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan standar kebutuhan.
- d. Menyusun tata cara sistem dan metode yang tepat serta efektif pada pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dengan lebih memprioritaskan pada kegiatan membangun interaksi dan komunikasi aktif dengan mengoptimalkan kearifan lokal yang ada di daerah hukum Polres Bandung.

6.6 Strategi

- a. Pemberdayaan sumber daya, yakni sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta sistem metode, guna mendukung peran Bhabinkamtibmas di Polres Bandung dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa guna membangun kepercayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kamdagri.
- b. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, dimana seluruh personil Polres Bandung, baik Perwira maupun dari golongan Brigadir, mulai dari level Kapolres sampai level bawah wajib menjalankan peran dan fungsi sebagai

Bhabinkamtibmas, sehingga bisa mewujudkan kemitraan yang optimal antara Polri dengan masyarakat.

7. KESIMPULAN

Dengan demikian, mengacu kepada persoalan-persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dukungan sumber daya organisasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa masih sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitas, begitupun dengan keberadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran belum optimal dapat

terpenuhi sehingga secara tidak langsung menghambat operasional dan mobilitas Bhabinkamtibmas.

2. Bahwa sistem dan metode kerjasama antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kamdagri yang kondusif belum begitu optimal dilakukan, yang dibuktikan dengan indikator masih kurangnya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi berupa interaksi kerja, perbedaan persepsi dan orientasi tujuan kerja, intensitas tindakan/kegiatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Agustinus Sri Wahyudi. 1996. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara
- Freddy Rangkuty. 2009. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk menghadapi Abad 21*, Cet. Ke 16, Jakarta, IkrarMandiriabadi.
- K. Bertens. 2000. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mabes Polri. 2005. *Grand Strategi Polri 2005-2012*. (Tidak diterbitkan untuk umum) Jakarta: Mabes Polri
- 2011. *Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II (2011-2014)*. (Tidak diterbitkan untuk umum) Jakarta: Mabes Polri
- Pierce, John A dan Richard B Robinson. 1997. *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jilid 1. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

- Smith, J. D.F.M. 2008. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sutanto, dkk. 2008. *Polmas: Falsafah Baru Kepolisian*. Jakarta: Grafika Indah.
- Suwarna Almuhtar. 2016. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam Membentuk Karakter Bangsa*. Hanjar Serdik Sespimmen Dikreg. Ke 56 TA. 2016. Lembang: Sespimpol.
- Stoner, James AF. Dkk. 1994. *Manajemen (edisi bahasa Indonesia) jilid I*. Jakarta: Prenhallindo.
- Manajemen Perencanaan dan Penanganan. 2013. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Manulang. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : Gajah Mada University Press.
- Modul JICA. 2012. *Implementasi Pelaksanaan Polmas*. Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 25 A.

Undang Undang No.2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011
tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

PeraturanKapolri No. 23tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
Kep 307/V/2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembinaan
Masyarakat..

Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2015 tentang
Polmas.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007
Tentang Daerah Hukum Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Perkap 07 tahun 2008 tentang Pedoman
Dasar Implementasi Optimalisasi
Polmas (Community policing).